

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sektor perkebunan pada perekonomian di Indonesia memiliki peranan strategis, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sebagai penyerap tenaga kerja, mengoptimalkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta sebagai penopang pertumbuhan industri manufaktur. Sektor perkebunan memiliki peran yang cukup besar bagi peningkatan pemanfaatan petani serta untuk penyediaan bahan baku pada industri dalam negeri dan juga sebagai sumber devisa negara (Arifin, 2001).

Sektor pertanian pada saat ini berkembang sangat pesat, dapat dilihat dari banyaknya industri yang dibangun terutama pada industri karet dan kelapa sawit. Tingginya jumlah perkebunan yang dimiliki swasta, masyarakat ataupun BUMN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkebunan Indonesia mempunyai komoditas unggulan pada tanaman pangan serta tanaman nonpangan. Komoditas kakao, teh, kelapa, serta tebu adalah komoditas pangan, dan tanaman nonpangan yaitu adalah karet, kapas, tembakau, dan kelapa sawit.

Komoditas subsektor perkebunan telah menjadi komoditas unggulan di Indonesia, yaitu kelapa, karet, kakao, kopi, dan kelapa sawit yang mempunyai luas areal serta produksi yang besar di Indonesia. Kelapa sawit adalah tanaman komoditas perkebunan yang penting di Indonesia serta masih mempunyai prospek yang baik. Petani menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai mata pencaharian

pokok. Kelapa sawit adalah komoditas yang dapat menghasilkan minyak sawit yang mampu mendukung perekonomian Indonesia (Fauzi, 2002).

Perkebunan kelapa sawit berdasarkan status pengusahaan terdiri dari perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara, serta perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat adalah salah satu pada pengusahaan perkebunan yang mempunyai luas areal serta produksi kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, sehingga perkebunan rakyat memiliki pengaruh besar pada produksi kelapa sawit di Indonesia (Ditjenbun, 2018). Perkebunan sawit rakyat dibagi menjadi dua yaitu perkebunan yang tidak bermitra dan perkebunan yang bermitra, petani kelapa sawit bermitra oleh perusahaan milik negara ataupun perusahaan milik swasta. Petani plasma adalah sebutan petani kelapa sawit yang bermitra sedangkan petani mandiri adalah sebutan bagi petani kelapa sawit yang tidak bermitra.

Petani plasma pada pengusahaan perkebunan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan petani mandiri sebab petani plasma dalam mengelola perkebunannya dibantu oleh perusahaan mitra, sedangkan petani mandiri mereka mengelola perkebunannya tanpa bantuan. Oleh sebab itu, perkebunan petani mandiri kurang terkelola dengan baik (Suharno *et al*, 2015). Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terdapat luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota (Hektar) Tahun 2016-2020

Wilayah	Luas Areal (Ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	94	94	94	94	94
Merangin	58.929	68.714	70.017	126.252	140.784
Sarolangun	35.464	35.492	35.520	82.023	72.735
Batanghari	48.797	52.206	52.350	144.978	143.456
Muaro Jambi	97.692	97.749	96.587	234.863	227.125
Tanjung Jabung Timur	90.988	94.344	96.384	156.899	153.515
Tanjung Jabung Barat	33.613	33.872	33.872	62.904	62.904
Tebo	46.004	59.468	60.128	110.004	106.052
Bungo	64.832	56.045	60.265	123.417	126.689
Kota Jambi	0	0	0	0	0
Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0
Provinsi Jambi	476.413	497.984	1.011.680	1.041.434	1.033.354

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Berdasarkan dari data tabel 1. Kabupaten Muaro Jambi luas perkebunan kelapa sawit dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Luas areal kebun kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2016 dengan luas 97.692 Ha dan menjadi kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit paling luas pada tahun 2020 yaitu 227.125 Ha. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2016-2020 merupakan kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Jambi hingga puncaknya yaitu pada tahun 2019 yaitu 234.863 Hektar.

Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Jambi hingga tahun 2020. Kecamatan Sungai Bahar terletak di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Kecamatan Sekernan. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi luas areal tanaman kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2. Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2021

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mestong	757	3.444	3.457	3.467	3.467
Sungai Bahar	3.096	22.746	26.246	26.260	26.260
Bahar Selatan	2.520	5.579	8.924	8.931	8.931
Bahar Utara	2.506	4.004	8.009	8.014	8.014
Kumpeh Ulu	1.724	14.916	15.844	15.852	15.852
Sungai Gelam	1.112	1.124	8.550	8.564	9.564
Kumpeh	1.135	12.399	15.032	15.040	15.040
Maro Sebo	6.155	9.803	9.803	9.810	9.810
Taman Rajo	1.244	1.244	1.244	1.245	1.245
Jambi Luar Kota	4.913	4.916	10.696	10.706	10.706
Sekernan	8.183	22.249	27.474	27.514	27.516
Muaro Jambi	33.345	102.424	135.279	135.403	232.725

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi 2022

Berdasarkan tabel 2. luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017-2021 yaitu pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit hanya 33.345 hektar dan pada tahun 2018 luas areal kelapa sawit 102.424 hektar dan terjadi perluasan areal sebanyak 32.979 hektar di tahun 2020 yaitu 135.403 hektar. Perluasan areal kelapa sawit terus meningkat hingga tahun 2021 dengan luas 232.725 hektar. Kecamatan Sungai Bahar luas areal perkebunan kelapa sawit 26.260 hektar hingga tahun 2021.

Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar juga telah memasuki masa pergantian tanaman atau peremajaan dengan jumlah yang paling luas di Kabupaten Muaro Jambi hingga 2020. Adapun data mengenai Luas Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tua (TT) atau Tanaman Rusak (TR) di Kabupaten Muaro Jambi menurut Kecamatan pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), Tanaman Tua (TT) atau Tanaman Rusak (TR) di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021

Kecamatan	Luas Areal (Ha)								
	TBM			TM			TT/TR		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Mestong	248	258	258	3.209	3.209	3.209	-	-	-
Sungai Bahar	989	1.631	1.858	14.670	14.670	14.670	10.587	9.959	9.732
Bahar Selatan	369	477	666	2.728	2.728	2.728	5.827	5.726	5.537
Bahar Utara	82	87	299	2.361	2.361	2.361	5.566	5.566	5.354
Kumpeh Ulu	1.769	1.777	1.777	14.075	14.075	14.075	-	-	-
Sungai Gelam	428	1.253	1.253	6.579	6.579	6.579	1.543	732	1.732
Kumpeh	1.159	1.167	1.167	13.501	13.501	13.501	372	372	372
Maro Sebo	3.502	3.509	3.509	6.301	6.301	6.301	-	-	-
Taman Rajo	865	866	866	379	379	379	-	-	-
Jambi Luar Kota	673	683	683	4.363	4.363	4.363	5.660	5.660	5.660
Sekernan	3.477	3.570	3.572	21.798	21.798	21.798	2.199	2.146	2.146
Muaro Jambi	13.561	15.278	15.908	89.964	89.964	89.964	31.754	30.161	30.533

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi 2022

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa Kecamatan Sungai Bahar mempunyai luas areal kelapa sawit dengan Tanaman Tua (TT) atau Tanaman Rusak (TR) pada tahun 2019 seluas 10.587 hektar dan mengalami penurunan menjadi 9.959 hektar dan pada tahun 2021 seluas 9.732 hektar. Kecamatan Sungai Bahar merupakan kecamatan dengan jumlah tanaman tua dan tanaman rusak terbesar dari tahun 2019-2021. Dengan demikian, tanaman tua atau tanaman rusak tersebut perlu dilakukan peremajaan.

Peremajaan merupakan salah satu kegiatan penting pada teknik budidaya. Peremajaan tanaman harus disiapkan dengan baik dan matang. Menurut Hutasoit *et al*, 2015 tentang persepsi petani pada kegiatan peremajaan sangat baik. Hal tersebut berimplikasi dengan tingginya tingkat kesiapan petani dalam melakukan peremajaan kelapa sawit pada saat umur tanaman kelapa sawit tidak lagi produktif. Peremajaan perkebunan kelapa sawit telah menjadi fokus pemerintah mulai tahun 2017.

Program peremajaan perkebunan kelapa sawit dinilai penting dikarenakan saat ini 2,4 juta hektar dari 5,6 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat kurang produktif. Dari 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit tersebut, terdapat 2,1 juta hektar terindikasi bahwa perkebunan berusia muda atau memiliki umur kurang dari 25 tahun yang menggunakan bibit dengan kualitas rendah. Sementara itu, 300.000 hektar kebun kelapa sawit sisanya adalah perkebunan tua atau tanaman yang memiliki umur diatas 25 tahun yang sudah tidak produktif lagi. Tanaman kelapa sawit yang tidak ekonomis lagi harus melakukan peremajaan. Adapun data mengenai tahun tanam, luas areal TBM, TM, dan TT berdasarkan Desa di Kecamatan Sungai Bahar tahun 2017 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tahun Tanam, Luas Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tua (TT) Berdasarkan Desa di Kecamatan Sungai Bahar Tahun 2017

Nama Desa	Tahun Tanam	Luas Areal Kelapa Sawit (Ha)			Jumlah (Ha)
		TBM	TM	TT	
Suka Makmur	83/84	38	215	456	709
Mekarsari Makmur	84/85	44	226	440	710
Marga Mulya	84/85	24	501	976	1.501
Panca Mulya	87/88	50	428	950	1.428
Marga Manunggal Jaya	86/87	20	390	980	1.390
Rantau Harapan	86/87	10	192	754	956
Bhakti Mulya	86/87	6	202	720	928
Tanjung Harapan	86/87	6	230	1.054	1.290
Berkah	86/87	4	219	838	1.061
Bukit Makmur	92/93	-	1.506	-	1.506
Bukit Mas	92/93	-	1.334	-	1.334
Sungai Bahar		202	5.443	7.168	12.813

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi 2022

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa tahun tanam kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sungai Bahar mulai ditanam pada tahun 1983-1984 di Desa Suka Makmur dan diikuti Desa Mekarsari Makmur dan Desa Marga Mulya pada tahun 1984-1985. Jika umur tertua kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sungai Bahar ditanam pada tahun 1983 maka usia tanaman kelapa sawit hingga saat ini adalah 39

tahun. Dimana umur tersebut sudah tidak ekonomis lagi dan harus dilakukan peremajaan kelapa sawit. Peremajaan kelapa sawit rakyat yang dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar telah banyak mendapat dana hibah dari BPDPKS untuk melaksanakan peremajaan.

Implementasi program peremajaan kelapa sawit rakyat yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memaknai peremajaan kelapa sawit merupakan sebuah upaya dalam pengembangan perkebunan yang dilakukan dengan mengganti tanaman yang sudah tua yang telah melawati usia ekonomis 25 tahun atau mempunyai produktivitas kurang dari 10 ton TBS per hektar per tahun pada umur minimal 7 tahun atau tanaman yang tidak menggunakan bibit bersertifikat dengan tanaman kelapa sawit yang memiliki kualitas tinggi dan bersertifikat.

Penggunaan bibit kelapa sawit yang telah bersertifikat, produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat diharapkan mampu meningkat karena telah menggunakan bibit unggul yang kualitasnya telah dijamin oleh pemerintah. Beberapa lembaga yang berperan serta dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat yaitu Kementerian Pertanian, BPDPKS, serta dinas perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah badan pengelola dana perkebunan yang berdiri pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dana pungutan industri kelapa sawit atau CPO

Supporting Fund (CSF). Dalam Peraturan Presiden No. 15 Pasal 1 Ayat 6 BPDPKS mempunyai tugas untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, serta menyalurkan dana. Pencairan dana hibah dapat diperoleh petani yang memiliki syarat yaitu petani harus tergabung kedalam kelompok tani yang aktif serta tergabung kedalam koperasi, mempunyai lahan maksimal 4 hektar, membuat akad kredit dengan perbankan supaya penggunaan dana dapat terkontrol serta petani harus mau berkomitmen dalam menjadi pelaku usaha yang peduli dengan kelestarian lingkungan (Lukmana, 2016).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah badan pengelola dana perkebunan yang berdiri guna melakukan penghimpunan dana pada pendorong pengembangan kelapa sawit. Program penggunaan dari dana yang dihimpun yaitu program bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui Kementerian Pertanian serta BPDPKS, pemerintah telah membuat program yang diperuntukkan kepada petani kelapa sawit.

Program PSR tersebut berfokus mengenai peremajaan kelapa sawit yang memiliki umur yang sudah tua, yaitu kelapa sawit yang telah memiliki umur ± 25 tahun supaya mampu meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit. BPDPKS mempunyai peran dalam menyalurkan alokasi dana peremajaan yang bersumber dari pungutan ekspor serta iuran para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang dihimpun serta dikelola oleh BPDPKS. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, dinas perkebunan memiliki peran dalam memberikan sosialisasi program peremajaan, mengumpulkan, serta membuat dan melaksanakan verifikasi rekomendasi teknis mengenai usulan peremajaan yang akan diajukan ke Kementerian Pertanian.

Program peremajaan kelapa sawit yang diwujudkan melalui pemberian bantuan biaya peremajaan kepada pekebun rakyat sebesar 30 juta rupiah per hektar dengan maksimal kebun empat hektar bagi setiap kelapa keluarga (KK). Komponen peremajaan yang didanai oleh BPDPKS meliputi biaya operasional persiapan peremajaan, biaya peremajaan, serta untuk pengembangan sumberdaya manusia.

Secara umum, biaya persiapan peremajaan yang mencakup persiapan administrasi seperti pembuatan peta kebun serta pengumpulan surat legalitas dan pembentukan kelembagaan pekebun. Biaya peremajaan seperti biaya persiapan lahan dan pengadaan bibit bersertifikat, pestisida, pupuk, alat pertanian, serta infrastruktur yang dibutuhkan. Biaya pengembangan sumberdaya manusia, yaitu yang meliputi biaya pendampingan dan fasilitasi kepada pekebun yang bertujuan dalam meningkatkan kapasitas pekebun untuk melaksanakan peremajaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit agar semakin produktif serta ramah lingkungan.

Program PSR mempunyai beberapa keuntungan yang mampu dijadikan landasan dalam kegiatan berkelanjutan. Keuntungan pertama yaitu pada aspek lingkungan. Program PSR mampu mengoptimalkan lahan kelapa sawit milik petani swadaya yang telah ada sehingga kualitas lahan sawit meningkat tanpa melakukan perluasan lahan tanpa merusak hutan. Keuntungan kedua yaitu dari segi ekonomi. Program PSR mampu memajukan sektor sawit dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mampu mendorong petani supaya mempunyai sertifikasi sawit yang berkelanjutan (BPDPKS, 2020).

Keuntungan ketiga yaitu dari segi sosial. Program PSR mampu mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Keuntungan keempat yaitu pada segi kelembagaan.

Program PSR telah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pada pemberdayaan lembaga lokal, seperti kelompok tani yang mempunyai keleluasaan untuk mengelola lahannya sendiri. Sumber dana yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hanya berjumlah 30 juta rupiah per hektar. Angka tersebut dinilai sangat kurang jika dana tersebut dipergunakan hingga masa panen, sebab dengan dana 30 juta rupiah per hektar per KK hanya mampu mencapai proses penanaman. Kondisi sosial ekonomi petani sangat mempengaruhi keberhasilan peremajaan kelapa sawit tersebut.

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar di 8 kabupaten. Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang mempunyai luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang paling besar yang berkontribusi sebesar 21,7%. Perkebunan kelapa sawit rakyat yang memiliki lahan terluas setelah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kontribusi 19,8% dan Kabupaten Merangin 13,1%. Provinsi Jambi memiliki kondisi pada tanaman kelapa sawit rakyat sebesar 23,43% Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 73,06% dan 3,5% tanaman kelapa sawit yang telah tua dan rusak. Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat yaitu 526.822 Ha serta tanaman kelapa sawit yang telah masuk dalam kondisi peremajaan yaitu 63,114 Ha.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan mendorong dalam peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pendudukan dalam pendanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit yaitu melalui program peremajaan kelapa sawit rakyat. Biaya dalam melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat menurut hitungan Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian mencapai 68 juta rupiah per hektar. Fakta pendanaan dilapangan bahwa dana hibah dari BPDPKS untuk melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat adalah sebesar 30 juta rupiah per hektar per KK. Angka tersebut cukup jauh dari perhitungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam peremajaan kelapa sawit rakyat yaitu sebesar 68 juta rupiah per hektar.

Persepsi atau pandangan petani mengenai peremajaan kelapa sawit dengan menggunakan dana bantuan dari BPDPKS tentunya memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan sosial dan ekonomi petani. Pandangan atau sikap petani serta motif petani dalam melaksanakan peremajaan menggunakan BPDPKS tentunya memberikan rasa senang terhadap petani sebab petani akan merasa terbantu dengan adanya bantuan dana, dan program peremajaan ini sangat penting dalam kelangsungan hidup untuk kedepannya bagi petani. Selain itu, harapan petani tentunya tinggi ketika telah melaksanakan peremajaan akan menghasilkan produksi yang meningkat guna memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Akan tetapi, dengan berbagai dampak positif peremajaan masih terdapat petani yang masih enggan untuk melakukan peremajaan kelapa sawit menggunakan dana BPDPKS.

Kondisi sosial dan ekonomi petani satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Faktor sosial yang berbeda seperti pendidikan non formal, pengalaman usahatani, pendapatan, luas lahan, dan modal akan membentuk persepsi petani yang berbeda pula. Petani dengan pendidikan yang lebih tinggi akan membentuk persepsi yang baik mengenai peremajaan menggunakan dana BPDPKS karena petani tersebut memiliki pengalaman yang lebih di bidang pendidikan non formal. Faktor sosial lain yang dapat membentuk persepsi yaitu pengalaman usahatani dan pendidikan non formal yang pernah ditempuh oleh petani karena dengan pengalaman

berusahatani yang sudah lama akan membentuk persepsi baik atau tidaknya peremajaan dengan menggunakan dana BPDPKS.

Pengalaman berusahatani mampu mendorong petani untuk melakukan peremajaan menggunakan dana dari BPDPKS. Faktor ekonomi seperti pendapatan dan luas lahan kelapa sawit yang diusahakan petani mampu membentuk persepsi mereka mengenai penggunaan dana dari BPDPKS. Petani dengan pendapatan tinggi ataupun rendah tentunya memiliki pandangan dan sikap positif mengenai peremajaan dari BPDPKS karena mereka akan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Luas lahan yang dimiliki petani tentunya akan menjadi pertimbangan petani dalam melaksanakan peremajaan karena biaya yang dibutuhkan tergolong besar jika ingin melaksanakan peremajaan secara mandiri. Luas lahan petani dengan maksimal 4 hektar dapat menggunakan bantuan dari BPDPKS dan tentunya mendapat pandangan baik bagi petani sehingga petani mampu melakukan peremajaan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Sedangkan modal yang dimaksud adalah simpanan atau tabungan petani untuk melakukan peremajaan.

Pencairan dana hibah tersebut mampu diperoleh petani dengan syarat petani harus tergabung kedalam kelembagaan seperti kedalam kelompok tani yang aktif atau tergabung kedalam koperasi. Kekurangan dana tersebut tentu harus ditanggung oleh petani itu sendiri dalam melaksanakan peremajaan kelapa sawit. Permasalahan yang dihadapi saat ini untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit yaitu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan masih terdapat petani yang belum mau untuk melakukan peremajaan, dengan adanya dana BPDPKS tentunya petani akan merasa terbantu dalam pembiayaan peremajaan kelapa sawit.

Faktor sosial ekonomi petani dalam peremajaan kelapa sawit rakyat merupakan penentu persepsi atau pandangan petani terhadap kegiatan peremajaan menggunakan dana BPDPKS seperti pendidikan non formal, pengalaman berusahatani, pendapatan, luas lahan, dan modal dengan keadaan tersebut akan muncul pandangan petani yang berbeda-beda mengenai peremajaan kelapa sawit dengan memanfaatkan bantuan dana hibah dari BPDPKS.

Selain faktor sosial dan ekonomi tersebut terdapat faktor lain yang membuat persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit menggunakan BPDPKS yaitu adalah petani yang memiliki hutang kepada pihak Bank maka petani tersebut tidak bisa mengajukan pendanaan peremajaan menggunakan dana BPDPKS. Petani yang memiliki hutang atau sertifikat tanah mereka digadai maka petani tersebut tidak dapat mengajukan pendanaan walaupun syarat lainnya telah terpenuhi. Persepsi petani mengenai peremajaan kelapa sawit rakyat tentunya memiliki pandangan positif atau negatif seperti dampak yang mereka rasakan terhadap adanya bantuan dari BPDPPKS terhadap keadaan sosial dan ekonomi petani.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Persepsi Petani dalam Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Kecamatan Sungai Bahar”**

1.2.Rumusan Masalah

Kecamatan Sungai Bahar merupakan kecamatan yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit swadaya terbesar kedua di Kabupaten Muaro Jambi setelah Kecamatan Sekernan pada tahun 2020-2021. Perkebunan kelapa sawit swadaya yang berada di Kecamatan Sungai Bahar pada tahun 2018 diusahakan seluas 3.096 Ha dengan jumlah yang sama pada tahun 2018. Produktivitas usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan ini adalah sebesar 3,38 ton/Ha dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 3,39 ton/Ha. Pada tahun 2019 Kecamatan Sungai Bahar memiliki luas perkebunan kelapa sawit yaitu 26.246 Ha dan meningkat sebanyak 14 Ha pada tahun 2020 dan menjadi 26.260 Ha.

Produktivitas pada tahun 2019-2020 cenderung menurun yaitu hanya 2,29 ton/Ha saja pada tahun 2019-2020. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan tanaman tua dan tanaman rusak. Pada tahun 2017 tanaman tua atau tanaman rusak hanya seluas 83 Ha dan meningkat di tahun 2018 menjadi 159 Ha. Peningkatan kerusakan dan penuaan pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar meningkat drastis pada tahun 2019 yaitu sebesar 10.587 Ha dan pada tahun 2020 sebesar 9.959 Ha.

Pada umumnya, tanaman kelapa sawit yang tidak produktif lagi akan berdampak pada penurunan produksi sehingga tindakan yang perlu dilakukan adalah peremajaan tanaman kelapa sawit. Akan tetapi, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar masih tergolong lambat. Petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar sebagian besar masih sulit dalam melaksanakan peremajaan yang disebabkan karena ketidakmampuan petani dalam hal pembiayaan peremajaan kelapa sawit. Jika

petani ingin melaksanakan peremajaan kelapa sawit maka petani perlu banyak melakukan pertimbangan ekonomi dalam keluarganya, sebab petani sangat menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya.

Resiko dalam kegagalan peremajaan juga menjadi pertimbangan besar untuk petani. Selain itu, kegiatan peremajaan kelapa sawit membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dan jika terjadi kegagalan maka petani akan mengalami kerugian yang sangat besar pula, sedangkan petani hanya menggantungkan penghasilannya dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Keberhasilan peremajaan kelapa sawit dinilai sangat penting dalam kelangsungan hidup petani. Peremajaan kelapa sawit dapat dilakukan dengan mandiri atau swadaya petani dalam kerangka bantuan dana dari pemerintah, atau dilakukan dengan biaya pribadi dari petani itu sendiri. Salah satu upaya dalam menjaga peran tanaman kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan mengenai penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 mengenai perkebunan. Peraturan perundangan tersebut menjadi landasan dalam penetapan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana serta tepat sasaran.

Kedadaan sosial dan ekonomi petani yang kurang layak untuk melakukan peremajaan secara mandiri merupakan salah satu alasan petani untuk melakukan peremajaan menggunakan dana dari pemerintah untuk dimasa yang akan datang. Kegiatan peremajaan kelapa sawit memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dan jika terjadi kegagalan maka petani akan mengalami kerugian

yang sangat besar. Faktor sosial ekonomi petani seperti pendidikan non formal, pendapatan petani, luas lahan, pengalaman usahatani, dan modal mampu mempengaruhi pandangan atau persepsi yang tercipta dari petani sehingga petani lebih memilih untuk melakukan peremajaan kelapa sawit dengan menggunakan dana bantuan dari pemerintah dibandingkan harus melakukan peremajaan dengan biaya mandiri dimasa yang akan datang.

Persepsi atau pandangan petani mengenai peremajaan menggunakan dana dari BPDPKS tentunya memiliki dampak positif untuk membantu keadaan ekonomi bagi kehidupan petani. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyak petani yang tergabung dalam lembaga untuk dapat melakukan peremajaan menggunakan dana BPDPKS. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor pendidikan non formal, pengalaman usahatani, luas lahan, pendapatan, dan modal dalam peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar?
2. Bagaimana persepsi petani dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar?
3. Bagaimana hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan adalah:

1. Mengetahui faktor pendidikan non formal, pengalaman usahatani, luas lahan, pendapatan, dan modal petani dalam peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar.
2. Mengetahui persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar.
3. Menggambarkan hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan persepsi petani dalam peremajaan kelapa sawit rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kecamatan Sungai Bahar.

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan faktor sosial ekonomi petani di Kecamatan Sungai Bahar.
2. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat.
3. Bagi peneliti berguna dalam pemenuhan syarat penyelesaian studi tingkat akhir sarjana Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi serta hasil analisa hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan persepsi petani menjadi sumbangan pemikiran pengembangan dalam peremajaan kelapa sawit rakyat.